**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015**

**Resty Fauziah Astuty, Marismiati, Ade Pipit Fatmawati**

**D4 Akuntansi Keuangan, Politeknik Pos Indonesia, email:** [**Fauziahresty17@gmail.com**](mailto:Fauziahresty17@gmail.com)

Abstrak

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkanperaturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perumusan masalah asosiatif dan hubungan kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target dan Realisasi Penerimaan/Penyetoran Pajak-Pajak Daerah. Dari hasil uji menggunakan alat statistik yang diolah menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X) sebesar 12,306. Maka didapat hasil bahwa Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintahan kota Bandung.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

**Abstract**

*Local Tax is a compulsory contribution to a region owed by an individual or a coercive entity under the Act by not obtaining a direct return and being used for regional purposes for the greatest possible prosperity of the people. Local Own-Source Revenue (PAD) are all receipts obtained by regions from sources within their own territory levied on the basis of local regulations, in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the effect of local taxes on local revenue on the government of Bandung. In this study using quantitative methods with the formulation of associative problems and causal relationships. The data used in this study are secondary data which is the Realization Report of Local Original Income and Target and Realization of Receipt / Deposit of Local Taxes. From the test results using statistical tools are processed using SPSS version 23.0. Result of t test indicate that variable of area tax (X) equal to 12,306. So the results obtained that the Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant influence. The conclusion of this study that the variable of local taxes have a significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD) in Bandung city government.*

***Keywords:*** *Local Tax, Local Revenue*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berazaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperkukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab .

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5 pendapatan daerah bersumber : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2009.

Pada tahun 2014 dan 2015 PAD kota Bandung tidak memenuhi target. Jika pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandung ini tidak dapat mencapai target, maka tentu pembangunan yang telah direncanakan kota Bandung akan sedikit terhambat. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 dikarenakan target pencapaian dari masing-masing sumber PAD itu sendiri realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah dianggarkan

Kota Bandung merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Selain itu, Bandung menjadi kota metrapolitan terbesar di Jawa Barat dan sekaligus Ibu kota Provinsi. Sampai sekarang Bandung tetap menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan dengan beragam jenis tujuan wisata, seperti wisata belanja, kuliner, budaya, dan wisata rekreasi dan alam. Letak kota Bandung yang dekat dengan Ibu kota, kini dapat ditempuh dengan waktu sekitar dua jam. Berbagai sarana transportasi umum bermunculan dan mempermudah akses untuk menuju atau keluar kota Bandung. Dari pajak daerah inilah yang akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan pengembangan dalam berbagai bidang di kota Bandung.

Melihat pentingnya pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dikota Bandung yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah pemerintah kota dimasa yang akan datang dan berdasarka hasil penelitian terdahulu yang menyatakan hasil penelitian yang berbeda maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung 2011-2015”**

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perumusan masalah asosiatif dan hubungan kausal yang mana menurut Sugiyono (2017:37) mengemukakan bahwa “rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.”

Sedangkan hubungan kausal menurut Sugiyono (2017:37) mengemukakan bahwa “hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen yang (dipengaruhi).”

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target dan Realisasi Penerimaan/Penyetoran Pajak-Pajak Daerah yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB tahun 2011-2015 di kota Bandung.

Desain penelitian korelasional yang mempunyai tujuan untuk mengukur besarnya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah sedangkan variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung

Dalam penelitian ini,peneliti memiliki dua variabel yang saling berkaitan. Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan dibab sebelumnya, maka dalam penelitian ini variabel Pajak Daerah (X) sebagai variabel bebas sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Pengertian kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2017:39) “variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel (terikat)”. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah:

X : Pajak Daerah

1. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2017:39) “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah:

Y : Pendapatan Asli Daerah

Dalam suatu penelitian dengan jumlah objek penelitian yang banyak diperlukan pembentukan populasi dan sampel penelitian. Sebuah penelitian pastilah memiliki populasi sebagai obyek yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam melaksanakan penelitian, terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan mempelajari mengenai populasi yang akan diteliti.

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menetapkan yang menjadi populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2015

Dalam penelitian ini adalah menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan teknik pengambilan sampel *Sampling Purposive*.

Berdasarkan teknik penentuan sampel yang telah ditentukan maka yang menjadi pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah ketersediaan data tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Pertimbangan data yang dimaksud adalah tersedianya data terbaru mengenai Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang telah di audit oleh auditor pemerintahan.

Dalam penelitian ini sampel yang diteliti adalah Laporan perbulan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung mengenai Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun yaitu 2011 sampai dengan 2015. Sehingga data yang menjadi sampel sebanyak 60 data laporan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Koefesien Korelasi *Product Moment***

Koefisien determinasi dengan symbol merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistic (Sugiono, 2015:75). Pengujian digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunya variabel dependen, dengan kata lain menunjukan seberapa besar kesamaan variabel yang akan diteliti. berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤ ≤ 1 ). Apabila sama dengan 0,hal ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhdap variabel dependen. Apabila semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

**Tabel 1 : Analisis Koefisien Korelasi *Product Moment***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | |
|  | | X | Y |
| x | Pearson Correlation | 1 | ,850\*\* |
| Sig. (1-tailed) |  | ,000 |
| N | 60 | 60 |
| y | Pearson Correlation | ,850\*\* | 1 |
| Sig. (1-tailed) | ,000 |  |
| N | 60 | 60 |
|  | | | | |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*Sumber : Output SPSS 23.0*

Dari tabel diatas nilai koefesien korelasi *Pearson Product Moment* antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah nilai *“r/pearson correlation”* sebesar r = 0,850. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena besarnya koefesien korelasi ini dalam tabel pedoman interprestasi koefesien korelasi terletak pada interval 0,8 – 1,000

**Analisis Regresi Linier Sederhana**

Menurut Sugiono (2017:261) “Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”.

**Tabel 2 : Analisis Regresi Linier Sederhana**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 87448,761 | 60915,906 |  | 1,436 | ,156 |
| Pajak Daerah | 1,135 | ,092 | ,850 | 12,306 | ,000 |
| a. Dependent Variable: PAD | | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa nilai konstan (a) sebesar-besarnya 87.448,761 dengan koefesien regresi (b) sebesar 1,135

**Analisis Koefesien Determinasi**

Dihitung didasarkan pada model statistic (Sugiono, 2015:75). Pengujian digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang Koefisien determinasi dengan symbol merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang diteliti terhadap variasi naik turunya variabel dependen, dengan kata lain menunjukan seberapa besar kesamaan variabel yang akan diteliti. berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤ ≤ 1 ). Apabila sama dengan 0,hal ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhdap variabel dependen. Apabila semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**3.Tabel Analisis Koefesien Determinasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summary** | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,850a | ,723 | ,718 | 274908,24558 |
| a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah | | | | |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai R2 = 0,723. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 72,3% Sedangkan nilai sisanya sebesar 18,7% merupakan faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah(PAD).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | | Standardized Coefficients | | t | Sig. | |
| B | | Std. Error | Beta | |
| 1 | (Constant) | 87448,761 | 60915,906 | | |  | 1,436 | ,156 | |
| Pajak Daerah | 1,135 | ,092 | | | ,850 | 12,306 | ,000 | |
| a. Dependent Variable: PAD | | | | | | | | |

**Tabel 4 : Hasil Penghitungan Uji t**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui thitung untuk variabel Pajak Daerah sebesar 12,306 dengan jumlah data (n) = 60, jumlah variabel (k) = 2, dengan pengujian satu pihak yaitu pihak kanan dimana signifikansi 0,05, dan nilai derajat kebebasan (df) = 60 – 2 = 58 , maka didapat ttabel sebesar 1,67155. Sehingga thitung lebih besar dari ttabel yaitu 12,306 > 1,67155 Kemudian tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Jadi , 0,00 < 0,05 artinya signifikan maka kesimpulannya adalah H0 ditolak Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**PEMBAHASAN**

**1.Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2011-2015**

Perkembangan penerimaaan pajak daerah pada pemerintahan kota Bandung mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 Pada tahun 2011 Pajak Daerah di Kota Bandung mengalami kenaikan yaitu kenaikan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 667.107.811.687,- dengan persentase kenaikan 13%, sedangkan nilai terendah Pajak Daerah pada tahun 2011 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 18.346.892.992,- Pada tahun 2012 Pajak Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 820.564.651.111,- dengan persentase kenaikan 16%, sedangkan nilai terendah Pajak Daerah pada tahun 2012 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 48.650.927.579,-. Pada tahun 2013 Pajak Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.194.087.447.016,- dengan persentase kenaikan 12%, sedangkan nilai terendah Pajak Daerah pada tahun 2013 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 65.492.581.886,- .Pada tahun 2014 Pajak Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.399.599.856.917,- dengan persentase kenaikan 13 %, sedangkan nilai terendah Pajak Daerah pada tahun 2014 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.65.265.081.637,- . Pada tahun 2015 Pajak Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.494.147.377.053,- dengan persentase kenaikan 11%, sedangkan nilai terendah Pajak Daerah pada tahun 2012 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 75.882.360.574,-.

Jadi secara keseluruhan jumlah Pajak Daerah di Kota Bandung dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.1.494.147.377.053,- pada bulan Desember tahun 2015 sedangkan nilai terendah Pajak Daerah kota Bandung yaitu Rp. 18.345.892.992,- sedangkan rata-rata keseluruhan Pajak Daerah di Kota Bandung pada Tahun 2011-2015 yaitu sebesar Rp. 536.703,- . Berdasarkan penjelasan diatas pajak daerah pemerintahan kota Bandung semuanya memenuhi target karena ada jenis-jenis pajak daerah yang mendukung jumlah pajak daerah diantaranya dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota .

**2.Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2011-2015**

Perkembangan penerimaaan Pendapatan Asli daerah pada pemerintahan kota Bandung mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung mengalami kenaikan yaitu kenaikan tertinggi pada bulan April sebesar Rp. 235.508.552.971,- dengan persentase kenaikan 144%, sedangkan nilai terendah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.30.055.475.023,-. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.005.583.424.429,- dengan persentase kenaikan 19%, sedangkan nilai terendah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 57.336.238.659,- . Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.442.775.238.323,- dengan persentase kenaikan 12%, sedangkan nilai terendah Pendaptan Asli Daerah pada tahun 2012 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 82.522.946.378,- .Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.716.057.298.378,- dengan persentase kenaikan 17 %, sedangkan nilai terendah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp.77.413.783.153,- . Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Kenaikan tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp. 1.859.695,643.505- dengan persentase kenaikan 12%, sedangkan nilai terendah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 98.513.943.553,-.

**3.Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Bandung**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah .

Sedangkan Pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintahan kota Bandung tahun 2011-2015 yang berdasarkan hasil koefisien *Product Moment* menunjukan bahwa korelasi nilai analisis koefisien *Product moment* antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah “r” sebesar 0,850. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yanag sangat kuat antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena besarnya koefisien korelasi ini dalam tabel pedoman interpretasi koefisien terletak pada interval 0,80 – 1,000.

Dari hasil analisis regresi linier sederhana dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 87448,761 artinya jika pajak Daerah nilainya 0 maka Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 87448,761 dan nilai koefesien pajak daerah bernilai positif sebesar 1.135 artinya setiap peningkatan pajak daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.135 satuan.

Dari hasil koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), hal ini menjelaskan bahwa Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 72,3%, sedangkan sisanya sebesar 18,7 % merupakan faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uji statistik t diketahui thitung > ttabel yaitu 12,306 > 1,67155. Kemudian tingkat signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan tersebut sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dengan ketentuan angka signifikansi penelitian yaitu 0,05. Jadi, 0,00 < 0,05 artinya signifikan maka kesimpulannya adalah H0 ditolak Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintahan Kota Bandung tahun 2011-2015 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan Pajak Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung yang diteliti bahwa kondisi Pajak Daerah dari tahun 2011-2015 adalah Baik karena jumlah Pajak Daerah berada dalam interval yang Baik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya sumber Pajak Daerah yaitu Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Meningkatnya penerimaan ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan rumah tangga dari kalangan masyarakat, baik rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produsen karena dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga tersebut maka Pajak yang mereka bayar kepada pemerintah daerahpun meningkat.

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung yang diteliti bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011-2015 adalah Sangat Baik karena jumlah Pendapatan Asli Daerah berada dalam interval yang Sangat Baik. Hal ini disebabkan meningkatnya sumber penerimaan pendapatan daerah terutama Pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung dari tahun 2011-2015.

**Rekomendasi**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan peneliti mencoba untuk memberikan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah yang telah dijelaskan di atas bahwa dari keseluruhan yang diteliti selalu mengalami peningkatan dan penurunan sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Pemerintah harus lebih bisa mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk menambah variabel lain untuk mengetahui variabel lain seperti hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Halim dan Syam Kusufi , 2013. *Akuntansi Sektor Publik,Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi 4. Jakarta : salemba Empat

Mardiasmo. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: ANDI.

Meilda Ellysa Putri, Sri Rahayu. 2014 *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Universitas Telkom

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Retribusi Daerah.* Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Samudra Azis, Azhari, 2015, *Perpajakan DI INDONESIA.* Jakarta: Rajawali

Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung *:* Alfabeta.

Sugiyono. 2017.*Statistika Untuk Penelitian.* Bandung *:* Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang dana perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 43 lain lain pendapatan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang pendapatan asli daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Vadia, suhadak. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Malang : Universitas Brawijaya